

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Secara umum kondisi ekonomi makro Kabupaten Boyolali cukup baik yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, meskipun dibawah pertumbuhan ekonomi provinsi selama lima tahun terakhir. Kondisi ekonomi makro di Kabupaten Boyolali ini tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi global dan nasional yang mana sempat terjadi gejolak akibat pengurangan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) namun tidak berdampak signifikan terhadap pergerakan perekonomian daerah di Kabupaten Boyolali, sebagai daerah dengan basis ekonomi utama bergerak di sektor pertanian.

Kenaikan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun pada prinsipnya menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut, untuk itu dengan memaksimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki menjadi kata kunci dalam menyongsong pembangunan di Tahun 2018 yang akan datang.

Secara terinci, perkembangan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali dalam lima tahun terakhir (2012-2016) tersaji pada uraian berikut.

1.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

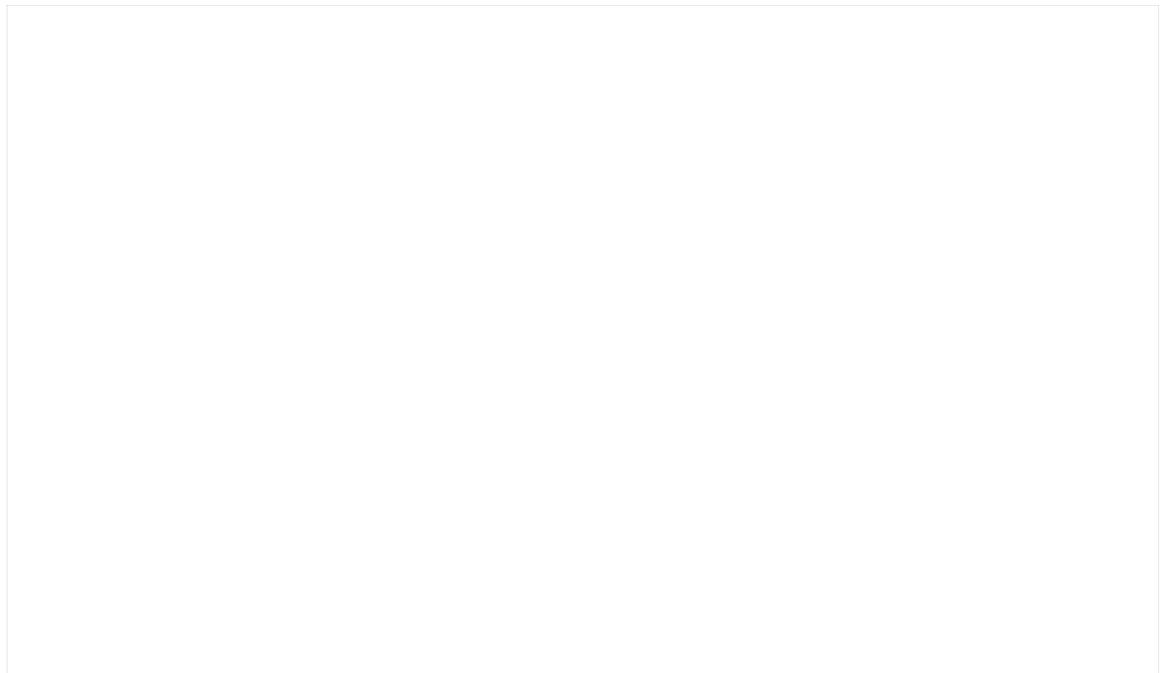
a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali selama 5 tahun terakhir (2012-2016) tersaji pada Grafik III.1 berikut:

GrafikIII.1.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Boyolali

Tahun 2012-2016



Sumber: Olah Data Diskominfo Kabupaten Boyolali

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pendapatan Domestik Regional Bruto Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun

2015 meningkat sebesar 11,52% dari angka pada tahun 2014. Sedangkan PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) pada tahun 2015 meningkat sebesar 5,91 % dari angka pada tahun 2014.

Adapun kondisi perkembangan PDRB Kabupaten Boyolali tahun 2011 sampai tahun 2015 atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Boyolali 2012 s.d 2016

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Nilai (Juta Rupiah)	(%) perubahan	Nilai (Juta Rupiah)	(%) perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	9.976.878	10,51	4.725.559	5,66
2013	11.168.765	11,95	4.982.066	5,43
2014	12.356.478	10,63	5.243.928	5,26
2015	13.420.176	8,61	5.526.549	5,39
2016	13.420.176	8,61	5.526.549	5,39
Rata-rata	12.068.494	10,62	5.200.930	4.34

Sumber data: BPS Kabupaten Boyolali

Tabel III.2
PDRB ADHB Eks Karesidenan Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2012 – 2015

KABUPATEN/ KOTA/ PROVINSI	PDRB ADHB (dalam juta rupiah)		
	2013	2014	2015
1. BOYOLALI	18.798.639,48	20.958.573,97	20.958.573,97
2. KLATEN	23.349.880,45	26.110.764,38	26.110.764,38
3. SUKOHARJO	22.029.889,84	24.260.290,49	24.260.290,49
4. WONOGIRI	17.657.525,95	19.674.351,24	19.674.351,24
5. KARANGANYAR	22.880.345,39	25,645.061,65	25,645.061,65
6. SRAGEN	21.870.689,03	24.488.922,71	24.488.922,71
7. SURAKARTA	29.092.454,16	32.038.668,79	32.038.668,79
8. JAWA TENGAH	832.953.579,11	925.662.692,21	925.662.692,21

Sumber data: BPS Kab. Boyolali

Tabel III.3

PDRB ADHK Eks Karesidenan Surakarta dan Propinsi Jawa Tengah
Tahun 2013– 2015

KABUPATEN/ KOTA/ PROVINSI	PDRB ADHK (dalam juta rupiah)		
	2013	2014	2015
1. BOYOLALI	16.265.748,68	17.085.661,59	17.085.661,59
2. KLATEN	20.299.990,92	21.391.717,78	21.391.717,78
3. SUKOHARJO	19.403.138,94	20.423.511,80	20.423.511,80
4. WONOGIRI	15.305.297,58	16.109.707,79	16.109.707,79
5. KARANGANYAR	19.224.635,92	20.208.968,35	20.208.968,35
6. SRAGEN	19.102.981,59	20.170.942,51	20.170.942,51
7. SURAKARTA	25.612.681,32	26.955.056,24	26.955.056,24
8. JAWA TENGAH	726.899.706,38	766.271.771,27	766.271.771,27

Sumber data: BPS Kab. Boyolali

Tabel III.4

Pertumbuhan PDRB Seri 2012-2016 Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Lapangan Usaha (persen)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,01	1,98	-1,78	6,41	6,41
B	Pertambangan dan Penggalian	4,85	5,57	6,08	2,04	2,04
C	Industri Pengolahan	9,22	10,26	8,36	6,17	6,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,64	8,52	1,20	-2,69	-2,69
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2,47	-0,46	2,55	1,05	1,05
F	Konstruksi	6,26	3,69	4,67	6,26	6,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,50	4,29	3,92	3,63	3,63
H	Transportasi dan Pergudangan	6,75	9,07	9,63	8,25	8,25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,97	2,02	7,84	7,44	7,44
J	Informasi dan Komunikasi	9,76	8,66	15,53	10,27	10,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,88	4,11	3,76	7,23	7,23
L	Real Estate	4,60	6,61	8,18	8,92	8,92
M,N	Jasa Perusahaan	6,94	13,75	8,20	9,12	9,12

O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,02	1,87	-0,16	4,76	4,76
P	Jasa Pendidikan	19,66	8,38	11,54	7,47	7,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,63	6,42	12,66	7,32	7,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	-0,43	8,93	8,09	2,97	2,97
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,33	5,83	5,04	5,98	5,98

Sumber data: BPS Kab. Boyolali

Tabel III.5

Pertumbuhan PDRB Seri 2012-2016 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,82	9,53	4,13	11,26	6,59
B	Pertambangan dan Penggalian	5,14	8,40	25,14	20,70	2,04
C	Industri Pengolahan	11,08	12,10	15,55	11,95	6,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,57	4,27	2,34	1,54	-3,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2,44	1,67	5,79	5,01	1,05
F	Konstruksi	10,28	7,58	13,43	11,43	6,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,23	8,86	7,02	7,68	3,63
H	Transportasi dan Pergudangan	12,65	21,70	19,14	14,94	7,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,43	5,93	13,74	13,07	7,44
J	Informasi dan Komunikasi	7,01	6,23	11,76	8,68	10,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,36	8,61	9,03	13,12	7,16
L	Real Estate	5,28	7,34	12,78	11,29	8,92
M,N	Jasa Perusahaan	8,42	18,60	12,22	15,69	9,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,18	7,66	6,96	9,26	4,76
P	Jasa Pendidikan	29,82	17,97	17,51	10,48	7,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18,22	12,48	17,79	13,03	7,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	-0,22	12,64	16,73	7,39	2,97
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		9,12	10,71	11,49	11,46	6,08

Sumber data: BPS Kab. Boyolali

Tabel III.6

Distribusi PDRB Seri 2012-2016 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha (Persen)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,0	24,7	23,1	23,1	23,54
B	Pertambangan dan Penggalian	3,9	3,8	4,3	4,7	4,46
C	Industri Pengolahan	26,7	27,0	28,0	28,1	28,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,1	0,1	0,1	0,1	0,05
F	Konstruksi	6,5	6,3	6,4	6,4	6,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,3	14,1	13,5	13,1	12,98
H	Transportasi dan Pergudangan	4,3	4,7	5,0	5,2	5,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,7	2,6	2,6	2,6	2,62
J	Informasi dan Komunikasi	2,4	2,3	2,3	2,2	2,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,3	2,3	2,2	2,3	2,26
L	Real Estate	1,1	1,1	1,1	1,1	1,07
M,N	Jasa Perusahaan	0,3	0,3	0,3	0,3	0,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,0	2,9	2,8	2,7	2,72
P	Jasa Pendidikan	5,0	5,3	5,6	5,6	5,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,9	0,9	0,9	0,9	0,93
R,S,T, U	Jasa lainnya	1,6	1,6	1,7	1,6	1,63
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber data: BPS Kab. Boyolali

Tabel III.7

Distribusi PDRB Seri 2012-2016 Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Lapangan Usaha (persen)

Kategori	Uraian	2012	2013	201	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,5	23,6	22,1	22,2	22,2
B	Pertambangan dan Penggalian	4,0	4,0	4,1	3,9	3,9
C	Industri Pengolahan	26,4	27,6	28,4	28,5	28,5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
F	Konstruksi	6,6	6,5	6,4	6,4	6,4

G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,9	14,7	14,5	14,2	14,2
H	Transportasi dan Pergudangan	4,2	4,4	4,6	4,7	4,7
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,8	2,7	2,8	2,8	2,8
J	Informasi dan Komunikasi	2,7	2,7	3,0	3,1	3,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
L	Real Estate	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3
M,N	Jasa Perusahaan	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,9	2,8	2,7	2,7	2,7
P	Jasa Pendidikan	4,5	4,6	4,9	4,9	4,9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber data: BPS Kab. Boyolali

Tabel III.8

PDRB Seri 2012-2016 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.244.253,4	4.648.625,5	4.840.590,8	5.385.673,0	5.530.618,7
B	Pertambangan dan Pengalihan	667.473,1	723.541,9	905.432,2	1.092.878,9	1.047.826,5
C	Industri Pengolahan	4.525.496,5	5.072.860,6	5.861.606,6	6.562.301,0	6.619.450,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.721,0	3.879,8	3.970,5	4.031,5	4.107,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.036,2	11.220,8	11.871,0	12.466,0	12.466,0
F	Konstruksi	1.103.337,8	1.186.977,5	1.346.416,6	1.500.300,2	1.500.300,2
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.431.512,8	2.646.938,0	2.832.826,3	3.050.289,7	3.050.289,9
H	Transportasi dan Pergudangan	723.448,1	880.435,2	1.048.978,2	1.205.699,2	1.197.091,5
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	452.677,3	479.503,0	545.382,2	616.651,2	615.651,2
J	Informasi dan Komunikasi	407.179,3	432.531,5	483.402,3	525.361,8	525.361,8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	397.639,0	431.879,0	470.893,5	532.678,5	530.337,7
L	Real Estate	186.527,8	200.223,9	225.819,3	251.304,4	251.304,4
M,N	Jasa Perusahaan	51.162,3	60.678,2	68.090,9	78.773,4	78.773,4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	508.351,0	547.268,8	585.366,1	639.551,1	639.551,1
P	Jasa Pendidikan	851.002,5	1.003.955,7	1.179.736,9	1.303.428,1	1.292.428,1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	145.367,6	163.511,2	192.606,5	217.702,2	217.702,2
R,S,T,U	Jasa lainnya	270.422,5	304.609,2	355.584,2	381.874,7	381.874,7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		16.980.608,0	18.798.639,5	20.958.574,0	23.360.964,9	23.495.135,2

Sumber data: BPS Kab. Boyolali

Tabel III.9

PDRB Seri 2012-2016 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
(Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.771.708,9	3.846.251,5	3.777.647,0	4.019.899,5	4.092.593,6
B	Pertambangan dan Penggalian	622.123,7	656.805,7	696.721,8	710.934,9	710.934,9
C	Industri Pengolahan	4.065.227,7	4.482.517,4	4.857.151,0	5.156.624,6	5.170.609,6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.644,6	3.955,1	4.002,5	3.894,8	3.880,7
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.992,8	10.942,5	11.221,4	11.339,2	11.339,2
F	Konstruksi	1.012.227,5	1.049.622,2	1.098.593,8	1.167.365,8	1.167.365,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.286.535,0	2.384.567,3	2.478.005,1	2.567.851,2	2.567.851,2
H	Transportasi dan Pergudangan	651.088,1	710.113,5	778.495,3	842.747,9	838.183,6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	433.997,4	442.776,1	477.495,1	513.043,5	513.043,5
J	Informasi dan Komunikasi	407.819,8	443.148,4	511.962,3	564.540,8	564.540,8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	344.283,3	358.417,7	371.893,0	398.767,2	398.505,9
L	Real Estate	181.833,1	193.860,9	209.725,6	228.433,2	228.433,2
M,N	Jasa Perusahaan	46.627,2	53.038,4	57.387,0	62.620,7	62.620,7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	453.012,3	461.497,0	460.751,4	482.683,1	482.683,1
P	Jasa Pendidikan	689.655,2	747.431,7	833.670,8	895.946,0	895.946,0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	125.359,0	133.403,8	150.298,1	161.299,9	161.299,9
R,S,T,U	Jasa lainnya	263.838,8	287.399,4	310.640,3	319.866,4	319.866,4
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		15.369.974,4	16.265.748,7	17.085.661,6	18.107.858,8	18.189.698,2

Sumber data: BPS Kab. Boyolali

c. Inflasi

Perkembangan inflasi di Kabupaten Boyolali cenderung fluktuatif, yang dipengaruhi oleh berbagai indikator pemicu inflasi baik yang bersifat internal maupun eksternal antara lain disebabkan oleh kenaikan BBM dan tarif dasar listrik yang berdampak kenaikan harga bahan pokok di pasar yang berdampak kenaikan dan faktor

eksternal lainnya. Adapun perkembangan inflasi di Boyolali seperti pada Grafik III.2 berikut:

Grafik III.2

Laju Inflasi Boyolali Tahun 2012-2016



Sumber: Olah Data Diskominfo Kab. Boyolali 2016

Dari tabel prediksi Indikator Ekonomi Makro tersebut di atas, mengindikasikan bahwa pada Tahun 2012 hingga Tahun 2014 indikator ekonomi makro Kabupaten Boyolali terus mengalami peningkatan. Namun pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 2,58 dari 7,45 pada Tahun 2014. Rendahnya Inflasi Tahun 2015 karena adanya penurunan harga BBM bersubsidi yang di awal Tahun 2015 terjadi dua kali, juga tidak terlepas dari relatif terjaganya pasokan bahan pangan bersamaan dengan masa panen pada semester satu. Demikian juga pada semester dua tidak terlepas karena adanya penurunan harga BBM bersubsidi di awal bulan Oktober seiring dengan penurunan harga minyak dunia. Oleh karena itu kebijakan pembangunan ekonomi Tahun 2018 yang akan datang merupakan rangkaian dari kebijakan pembangunan ekonomi Tahun 2017, yang

berpedoman pada visi RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 yaitu "Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera". Dalam rangka pelaksanaan visi tersebut, arah kebijakan yang ditempuh sebagai berikut sedangkan berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Boyolali adalah:

- a. mengoptimalkan pemasaran produk-produk unggulan daerah baik di dalam negeri maupun keluar negeri.
- b. meningkatkan produktivitas hasil pertanian (dalam arti luas) dan pengolahan produk-produk pertanian untuk mendukung ketahanan pangan.
- c. mengembangkan obyek dan daya tarik wisata daerah.
- d. peningkatan produksi perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.
- e. meningkatkan pemerataan distribusi dan akses pangan masyarakat sampai tingkat rumah tangga.

c.e.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018

Selain didasarkan pada kondisi ekonomi Tahun 2016 dan tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Boyolali untuk Tahun 2018 akan sangat dipengaruhi juga oleh berbagai faktor eksternal yang berupa tantangan dan prospek kedepannya. Tantangan dan prospek perekonomian daerah ini dapat berupa kebijakan pemerintah baik kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten sendiri maupun pemerintah di atasnya ataupun berupa fenomena-fenomena lainnya baik yang bersifat lokal, nasional, maupun global. Sejalan dengan kondisi tersebut, *tantangan* yang dihadapi Kabupaten Boyolali dalam perekonomian daerah adalah:

1. Implementasi ASEAN *Economic Community* (AEC) memberikan tantangan bagi persaingan tenaga kerja profesional dan peningkatan standar kualitas produk;
2. Fluktuasi harga BBM dunia mengakibatkan ketidak pastian ekonomi;
3. Kondisi geografis wilayah terhadap kerentanan bencana;
4. Alih fungsi lahan tidak sesuai dengan peruntukan;

5. Masih rendahnya kualitas SDM mengakibatkan daya saing yang rendah;
6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah; dan
7. Belum optimalnya sinkronisasi kebijakan sektoral.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, *peluang* yang dapat dimanfaatkan adalah:

1. Meningkatnya peluang investasi;
2. Semakin terbukanya peluang pasar ekspor bagi produk Boyolali;
3. Upah tenaga kerja di Boyolali yang kompetitif;
4. Komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang mendukung perekonomian;
5. Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah berdasar pada RTRW;
6. Tingginya komitmen dan dukungan pemerintah pada pengembangan potensi daerah.

Mengacu pada perekonomian nasional maupun regional, yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian daerah Kabupaten Boyolali maka untuk memantapkan pertumbuhan ekonomi *upaya-upaya* yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
- b) menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.
- c) meningkatkan daya saing daerah, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan yang akan mempengaruhi keberlangsungan usaha dan perekonomian daerah sehingga dapat mempertahankan

ketersediaan lapangan kerja bahkan mungkin dapat menambah lapangan kerja.

- d) menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas sebagai sarana agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan guna mendukung masuknya investasi.
- e) meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan.
- f) meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Boyolali, guna menciptakan lapangan kerja.
- g) meningkatkan koordinasi dengan pemerintahan di atasnya guna terwujudnya pembangunan sektoral yang optimal.
- h) mengantisipasi kerentanan wilayah terhadap bencana.

h).2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada Ketentuan Perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Boyolali secara umum difokuskan pada upaya peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah baik dalam pengelolaan potensi pendapatan daerah yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya maupun pengelolaan belanja daerah yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Program Kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2017.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2017 sebagai pelaksanaan agenda Pembangunan Tahun ke-2 (dua) pada RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Berdasarkan pada asumsi-asumsi tersebut di atas, maka untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah, diperlukan langkah-langkah dan arah kebijakan keuangan daerah yang mengacu pada:

1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui perluasan obyek pajak yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan, kualitas SDM pengelola dan koordinasi antara SKPD terkait;

3. Penataan *performance budgeting* melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja secara efisiensi, efektif dan berkesinambungan;
4. Anggaran daerah yang bertumpu pada kepentingan publik dan tepat sasaran.

Adapun Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2017 terdiri dari beberapa komponen-komponen sebagai berikut:

- i. Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah;
- ii. Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung;
- iii. Pembiayaan Daerah.

iii..2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Tabel III.10

Rekapitulasi Realisasi dan Prediksi

Keuangan Kabupaten Boyolali dan Kerangka Pendanaan

Kabupaten Boyolali Tahun 2015 sampai dengan Proyeksi Tahun 2018

NO	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Tahun Berjalan	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2018
		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	1.937.150.183.000	1.993.471.621.562	2.110.492.356.000	2.113.225.430.000
2	BELANJA	1.832.767.460.000	2.057.281.803.196	2.142.157.436.000	2.149.486.544.000
3	PEMBIAYAAN	131.349.162.000	206.892.995.537	31.665.080.000	36.261.114.000

Sumber: BKD Kab. Boyolali

iii..2.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru.

Pendapatan Kabupaten Boyolali Pada Tahun 2016 naik sebesar Rp 117.020.734,00 dari Tahun 2016, sedangkan di Tahun 2018 ditargetkan naik menjadi Rp 2.113.225.430.000,00 atau sekitar 0,1% dari Tahun 2017. Asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2018 antara lain:

1. Realisasi Pajak Daerah TA 2018 diasumsikan bisa melebihi realisasi Tahun 2017;
2. Realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang sah yang mempunyai trend meningkat dari tahun ke tahun;
3. Dana Perimbangan asumsinya tidak berkurang dari Tahun 2017 bahkan diharapkan lebih;
4. Rumus Baku Penentuan Kenaikan dan Penurunan DAU didasarkan pada Alokasi Dasar ditambah celah fiskal adapun yang dimaksud dengan Alokasi Dasar, Celah Fiskal dan komponen yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut:
 - Alokasi Dasar : Kebutuhan Aparatur Daerah
 - Celah Fiskal :Kemampuan Keuangan fiskal Daerah dan berapa kebutuhan fiskal Daerah
 - Komponennya adalah :
 - Data jumlah penduduk yang valid
 - Index pembangunan manusia
 - Index kemahalan kontruksi
 - PDRB.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah yang pemungutan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pada dasarnya PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah yang menuntut ketergantungan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat semakin berkurang. Salah satu isu yang menarik terkait dengan kebijakan desentralisasi fiskal adalah menyangkut peningkatan kapasitas daerah untuk meningkatkan PAD atau yang disebut dengan *taxing power*. Namun demikian, undang-undang mengamanatkan bahwa peningkatan PAD tidak boleh menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang menghambat pelayanan publik dan iklim dunia usaha.

Secara teoritis besar kecilnya potensi PAD pada suatu daerah dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan, terutama pada sektor industri dan jasa. Sebab kedua sektor tersebut merupakan basis PAD yang sangat dominan. Dengan demikian, untuk mengestimasi besarnya PAD dan pertumbuhan PAD setiap tahunnya dapat digunakan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah yang digunakan. Komponen PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain PAD.

Dalam pengelolaannya harus diperhatikan upaya peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Upaya ekstensifikasi pajak tidak hanya cukup mengandalkan kondisi sarana prasarana yang ada saat ini. Untuk itu, prioritas pembangunan harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan tanpa mengesampingkan konsistensi dalam menekan ketimpangan pendapatan masyarakat sebagai bentuk upaya menekan angka kemiskinan, serta tetap memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Beberapa arah yang akan dilakukan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi :

- a. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
- c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- d. Optimalisasi pendapatan dari Lain-lain PAD yang sah;
- e. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- f. Memberikan insentif dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target dalam satu tahun anggaran.

2) Dana Perimbangan yang meliputi :

- a. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
 - b. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - c. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yang meliputi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Asumsi-asumsi terkait prakiraan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2018.

- a) Diperkirakan ada peningkatan wajib pajak baru;
- b) Semakin meningkatnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak;
- c) Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah;
- d) Meningkatnya pendapatan dari Lain-lain PAD yang sah;
- e) Meningkatnya penerimaan dari dana bagi hasil pajak provinsi;
- f) Meningkatnya alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat, antara lain DAU, DAK, dan Bagi Hasil.

Proyeksi rencana kebijakan pendapatan daerah dapat dilihat pada Tabel III.11 berikut ini.

Tabel III.11
Realisasi dan Proyeksi
Pendapatan Kabupaten Boyolali
Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018

No.	Uraian	Jumlah			Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2018
		Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Tahun Berjalan 2017	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1.1	Pendapatan asli daerah	260.633.617.000	250.959.622	260.593.837.000	264.303.162.000
1.1.1	Pajak daerah	76.861.736.000	69.891.500	74.186.500.000	77.895.825.000
1.1.2	Retribusi daerah	31.065.804.000	14.709.105	14.723.377.000	14.723.377.000
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.282.461.000	8.695.610	11.632.060.000	11.632.060.000
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	144.423.615.000	157.663.407	160.051.900.000	160.051.900.000
1.2	Dana perimbangan	1.092.341.267.000	1.504.412.565	1.400.111.659.000	1.400.111.659.000
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil	35.288.695.000	44.180.456	45.606.961.000	45.606.961.000

	bukan pajak				
1.2.2	Dana alokasi umum	968.089.632.000	1.032.744.000	1.032.744.010.000	1.032.744.010.000
1.2.3	Dana alokasi khusus	88.962.940.000	427.488.109	321.760.688.000	321.760.688.000
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	584.175.298.000	332.565.267	449.786.860.000	443.618.500.000
1.3.1	Hibah	21.958.312.000	1.168.360	11.168.360.000	5.000.000.000
1.3.2	Dana darurat				
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	106.801.964.000	107.456.279	120.556.279.000	120.556.279.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	413.125.282.000	167.801.074	261.922.667.000	261.922.667.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi	42.289.739.000	56.139.554	56.139.554.000	56.139.554.000
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)	1.937.150.183.000	2.087.937.454	2.110.492.356.000	2.108.033.321.000

Sumber: BKD Kab. Boyolali

f).2.12 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja daerah adalah sebagai berikut.

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
3. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan.

4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Kerja Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus SMART (*Specific, Measurable, Acceptable, Reliable, Time*) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut :
 - a. Mencukupi kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum;
 - b. Mendanai perbaikan lingkungan permukiman di perkotaan dan di pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan, dan jembatan;
 - c. Mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum, sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Pemerintah Daerah menyediakan dana pendamping/*cost sharing* pada program/kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum Komposisi Belanja Kabupaten Boyolali dibagi menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung pada Tahun 2017 didominasi oleh belanja pegawai. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan belanja pegawai sehingga kebijakan

pemerintah Kabupaten Boyolali memprioritaskan belanja wajib khususnya belanja pegawai.

Belanja bagi hasil ke desa mengalami peningkatan dikarenakan adanya kenaikan retribusi sehingga berdampak pada kenaikan bagi hasil ke desa. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa naik dikarenakan perhitungan alokasi dana desa (ADD) berdasarkan minimal 10% dari penjumlahan dari dana perimbangan, dana bagi hasil, pajak dan retribusi, yang mana untuk Tahun 2017 alokasi dana tersebut diprediksi meningkat. Belanja tidak terduga tetap dianggarkan untuk mengantisipasi adanya dampak bencana di Kabupaten Boyolali. Selain adanya peningkatan dari ADD, transfer Dana Desa dari Pusat diperkirakan akan meningkat.

Untuk belanja langsung, arah pengelolaan belanja daerah antara lain untuk pemenuhan belanja yang bersifat mengikat sesuai dengan regulasi maupun petunjuk teknis pengalokasian jenis sumber dana antara lain BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), WISMP (*Water Resources Sector Management Program*), pendampingan DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota. Selain itu juga dalam rangka mewujudkan program/kegiatan prioritas pembangunan Tahun 2017 serta sinergitas rencana program/kegiatan kabupaten dengan pemerintah provinsi maupun pusat yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar;
2. Mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran;
3. Pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat secara baik dari ketersediaan, distribusi, maupun diversifikasi;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
5. Meningkatkan daya saing ekonomi yang berbasis pada potensi unggulan daerah;
6. Meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

7. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup, serta upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana;
8. Pengembangan pariwisata, penelitian, kreativitas dan inovasi masyarakat;
9. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih; dan
10. Memantapkan kesadaran demokratisasi dan kondusivitas daerah.

Berikut realisasi dan proyeksi belanja daerah Tahun 2015-2018 tersaji dalam Tabel III.12 berikut ini:

Tabel III.12
Realisasi dan Proyeksi
Belanja Kabupaten Boyolali
Tahun 2015 s.d Tahun 2018

NO	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Tahun Berjalan 2017	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2018
-1	-2	-3	-4	-5	-6
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.205.647.561.00	1.415.727.755	1.324.678.393.00	1.345.628.393.00
2.1.1	Belanja pegawai	954.269.355.000	1.062.606.762	917.348.268.000	917.348.268.000
2.1.2	Belanja bunga				
2.1.3	Belanja subsidi				
2.1.4	Belanja hibah	57.720.025.000	19.539.575	38.282.915.000	38.282.915.000
2.1.5	Belanja bantuan social	8.313.969.000	10.940.000	13.950.000.000	13.950.000.000
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	8.197.128.000	8.645.662	8.890.988.000	8.890.988.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	117.147.084.000	311.995.756	344.156.222.000	365.156.222.000
2.1.8	Belanja tidak terduga	0	2.000.000	2.050.000.000	2.000.000.000
A	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.205.647.561.000	1.415.727.755	1.324.678.393.000	1.345.628.393.000
2.2	Belanja Langsung	627.119.898.000	735.238.813	817.479.043.000	798.666.042.000
2.2.1	Belanja pegawai	39.800.939.000	68.481.299	66.956.071.000	-
2.2.2	Belanja barang dan jasa	277.143.494.000	286.656.943	338.653.482.000	-
2.2.3	Belanja modal	310.175.465.000	380.100.571	411.869.490.000	-

B	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	627.119.898.000	735.238.813	817.479.043.000	798.666.042.000
					0
C	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.832.767.460.000	2.150.966.568	2.142.157.436.000	2.144.294.435.000

Sumber: BKD Kab. Boyolali

10.e.13 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi untuk mencapai keseimbangan anggaran dengan tetap memperhatikan misi untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah timbul karena jumlah belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembiayaan kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah.

Komponen penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Boyolali pada Tahun 2015-2018 utamanya didominasi oleh Sisa Lebih Anggaran tahun lalu (SiLPA). SiLPA akan menjadi alternatif pertama yang akan digunakan apabila terjadi defisit anggaran. Ada tidaknya SiLPA dan besar kecilnya SiLPA sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Dengan demikian keberadaan SiLPA tersebut memberikan sinyal adanya kinerja yang baik pada tahun anggaran bersangkutan.

Dalam komponen Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2017 direncanakan penyertaan modal sebesar Rp27.125.000,- kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam era ekonomi dan desentralisasi fiskal sekarang ini pemerintah daerah perlu meningkatkan keahlian dalam manajemen

dana dan manajemen investasi agar keuangan daerah dapat dikelola secara optimal sehingga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Misi dan motivasi kegiatan investasi atau penyertaan modal tidak hanya semata-mata menambah penerimaan daerah namun untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik.

Struktur realisasi dan prediksi pembiayaan daerah pada Tahun 2015-2018 tersaji pada Tabel III.13 berikut ini.

Tabel III.13
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Boyolali
Tahun 2015–2018

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Tahun Berjalan	Proyeksi pada 2018
		2015	2016	2017	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
3.1	Penerimaan pembiayaan				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	162.441.048.00 0	75.000.000	64.056.570.00 0	50.000.000.000
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	261.114.000	261.114.000	261.114.000	261.114.000.000
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0
3.1.7	Penerimaan titipan uang jaminan	0	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	162.702.162.00 0	75.261.114.000	64.317.684.00 0	50.261.114.000
3.2	Pengeluaran pembiayaan				
3.2.2	Penyertaan modal	29.353.000.000	12.232.000.000		

	(Investasi) daerah			29.544.789.00 0	14.000.000.000
3.2.3	Pembayaran pokok utang	0	-	-	0
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	2.000.000.000	-	3.000.000.000	0
3.1.7	Pengembalian titipan uang jaminan	0	0	107.815.000	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	31.353.000.000	12.232.000.000	32.652.604.00 0	14.000.000.000
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	131.349.162.00 0	63.029.114.000	31.665.080.00 0	36.261.114.000

Sumber: BKD Kab. Boyolali